

## Izin Lokasi untuk Pihak Asing

Mantan Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede ternyata telah mengeluarkan izin lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III kepada investor swasta asing, PT Bajradaya, perusahaan yang berafiliasi dengan investor asal China, China Huadian Corporations.

Izin lokasi dikeluarkan menjelang masa berakhirnya jabatan Rudolf dan baru diketahui publik akhir pekan lalu.

Jika PT Bajradaya menjadi pengembang PLTA Asahan III, tak satu pun PLTA yang menggunakan sumber air Sungai Asahan dikuasai perusahaan dalam negeri. Di hulu, PLTA Asahan I dimiliki China Huadian Corporations. Di bawahnya, PLTA Asahan II, yang lebih dikenal dengan nama PLTA Siguragura dan PLTA Tangga, dikuasai PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), perusahaan peleburan aluminium yang dikuasai Jepang.

Rudolf tetap mengeluarkan izin lokasi ke PT Bajradaya meski perusahaan tersebut belum menandatangani perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Rudolf tak peduli meski Menteri Negara BUMN meminta agar izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III diberikan kepada PLN.

Kabar pemberian izin lokasi kepada PT Bajradaya oleh Rudolf dibenarkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut Washington Tambunan.

Menurut Washington, izin lokasi diberikan Gubernur Rudolf pada bulan Maret silam. Meski telah diberikan sejak lama, namun pemberian izin lokasi ini terkesan diam-diam karena baru diketahui publik akhir pekan lalu saat Sekretaris Daerah Pemprov Sumut RE Nainggolan mengakui izin lokasi PLTA Asahan III sebenarnya telah lama dikeluarkan gubernur.

Menurut Washington, salah satu pertimbangan izin lokasi diberikan Rudolf kepada PT

Bajradaya karena perusahaan tersebut dinilai berhasil membangun pembangkit listrik swasta.

"PT Bajradaya dianggap sebagai salah satu pembangkit swasta atau IPP (independent power producers) yang berhasil. Proyek PLTA Asahan I yang dikerjakan mereka tergolong berhasil," kata Washington di Medan, Sabtu (27/9).

Saat ditanya apakah ada pihak lain yang menekan Rudolf saat itu sehingga memberikan izin lokasi ke PT Bajradaya, Washington menolak menjawabnya.

"Saya tak berkompeten menjawab pertanyaan itu. Sebaiknya langsung saja ditanyakan ke Pak Rudolf," katanya.

Washington tak mengesampingkan kemungkinan pemerintah pusat tak merestui pemberian izin lokasi ke PT Bajradaya. Untuk proyek PLTA Asahan III, kata Washington, PT Bajradaya sebenarnya juga belum mengantongi izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"IUKU ini menjadi dasar bagi perusahaan swasta mendapatkan PPA dari PLN. Sampai sekarang, untuk proyek PLTA Asahan III, memang PT Bajradaya belum mendapatkan IUKU," katanya.

Lebih lanjut, Washington mengatakan, keputusan mengenai siapa yang berhak membangun PLTA Asahan III tetap ada pada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM.

"Sebenarnya keputusan finalnya tetap ada di tangan Menteri ESDM. Kalau menteri berkata lain, tentu saja izin lokasi yang telah diberikan Gubernur Sumut tak ada artinya," kata Washington.

Untuk PLTA Asahan I, PLN terpaksa membeli listrik dari China Huadian Corporations sebesar 4,6 sen dollar AS per kilowatt hour (Kwh).

Berdasarkan data dari PLN, jika proyek PLTA Asahan III dibangun oleh mereka, maka biaya produksi yang dikeluarkan hanya sekitar 2,3 sen dollar AS per-Kwh.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Bidang Pengawasan Sumarsono telah menyurati Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin perihal belum dikeluarkannya izin lokasi pembangunan PLTA Asahan III. (BIL)